

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 16 Oktober 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo Halaman 2	Rabu, 16 Oktober 2019	DKI Minta Rancangan Jalan Tol Susun Pelabuhan Dimodifikasi	Pemerintah DKI Jakarta mendukung pembangunan jalan Tol Harbour Road II yang bakal dibiayai oleh Pihak Swasta, Bahkan DKI telah menunda pembangunan flyover Sunter Pernai Agar Proyek Jalan Tol tersebut bisa di kerjakan lebih awal.
2	Bisnis Indonesia Halaman 7	Rabu, 16 Oktober 2019	Bendungan Rp2,72 Triliun Dilelang	Berdasarkan Informasi Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikutip bisnis, Selasa (15/10) pelelangan bendungan Jragung Dibagi menjadi tiga paket.
3	Bisnis Indonesia Halaman 7	Rabu, 16 Oktober 2019	BUMN Perlu jadi Pionir Di KEK	Pembangunan Infrastruktur dasar menjadi modal penting untuk menarik minat investor menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penempatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pioneer pelaku ekonomi dapat menjadi langkah selanjutnya bila para infestor tetap enggan melabuhkan dananya di KEK
4	Bisnis Indonesia Halaman 8	Rabu, 16 Oktober 2019	Danau Toba Kantongi Investor Tujuh	Adapun Nilai total investasi untuk proyek itu sebesar Rp6,1 triliun. "Untuk tahap pertama, nilai investasi yang sudah terealisasi sekitar Rp2 triliun dari total investasi sebesar Rp6,1 triliun." Kata arie pasetyo, direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Selasa (15/10).
5	Bisnis Indonesia Halaman 11	Rabu, 16 Oktober 2019	JSMR Akan Ikuti Proses PKPU	Jasamarga (Persero) Tbk. menyatakan akan menghadapi proses gugatan perkara penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga Jakarta Pusat, yang diajukan oleh Muisah dan Musthafa Rachman.
6	Kompas Halaman 15	Rabu, 16 Oktober 2019	Jaga Masa Depan teluk	Teluk balikpapan masuk dalam rancangan pengembangan jika ibu kota benar-benar pindah ke panajam passer utara. Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang.
7	Republika Halaman 22	Rabu, 16 Oktober 2019	Tanggul Laut	Warga beraktivitas di Kawasan tanggul laut muara baru, Jakarta utara, selasa (15/10). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perusahaan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut nasional.
8	Bisni Indonesia Halaman 26	Rabu, 16 Oktober 2019	Kulon Progo bisa jadi pusat logistik	Keberadaan badara kulon Progo (YIA) tidak hanya mendorong jumlah wisatawan ke daerah istimewa Yogyakarta (DIV) dan Jawa Tengah, tetapi juga menumbuhkan pusat logistik baru.

Judul	<b>DKI Minta Rancangan Jalan Tol Susun Pelabuhan Dimodifikasi</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Koran Tempo Halaman 2		
Resume	Pemerintah DKI Jakarta mendukung pembangunan jalan Tol Harbour Road II yang bakal dibiayai oleh Pihak Swasta, Bahkan DKI telah menunda pembangunan flyover Sunter Permai Agar Proyek Jalan Tol tersebut bisa di kerjakan lebih awal.		

METRO

## DKI Minta Rancangan Jalan Tol Susun Pelabuhan Dimodifikasi

Pembangunan jalan tol di kawasan Kota Tua dikawatirkan berdampak pada konstruksi bangunan cagar budaya.

EDISI, 16 OKTOBER 2019



**JAKARTA** – Pemerintah DKI Jakarta mendukung pembangunan jalan Tol Harbour Road II yang bakal dibiayai oleh pihak swasta. Bahkan DKI telah menunda pembangunan flyover Sunter Permai agar proyek jalan tol tersebut bisa dikerjakan lebih awal.

Jalan tol susun pelabuhan sepanjang 9,53 kilometer ini akan dibangun PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), yang menggandeng PT Wijaya Karya Persero dan PT Girder Indonesia. Jalan tol ini diperkirakan melayang di atas sejumlah situs bersejarah di kawasan Kota Tua, seperti Gudang Timur dan Museum Bahari.

Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan proyek jalan tol susun rute Tanjung Priok-Pluit itu masih dibahas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jadi, dia belum mengetahui detail rancangannya. "Baru (mengetahui) laporan awal, seperti rutenya mana, panjang berapa, begitu," ujar Hari, kemarin.

Jika rute jalan tol melintasi kawasan Kota Tua, kata Hari, harus ada solusi supaya tidak memicu kerusakan bangunan cagar budaya. Misalnya saja dengan memodifikasi rancangan desain sehingga tiang penyangga jalan tidak berada di kawasan bangunan bersejarah. "Bisa saja girder dibuat lebih panjang supaya tiang tidak turun ke kawasan cagar budaya," Hari mencontohkan.

Anggota Tim Sidang Pemugaran Cagar Budaya, Erlinda, juga belum mendapat informasi tentang rencana pembangun jalan tol di kawasan Kota Tua. "Belum ada komunikasi untuk membahas soal itu dengan kami," ucap dia. Kendati demikian, ia berharap pembangunan apa pun yang direncanakan oleh pemerintah tak merusak atau berdampak negatif terhadap bangunan bersejarah yang ada di Jakarta.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, menuturkan desain dan rancang bangun jalan tol susun masih didiskusikan bersama para ahli teknik. Lembaganya juga secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta. "Kami masih menunggu approval rancang desain dari Kementerian PUPR," ujar Danang.

Danang menambahkan, pembangunan jalan tol Harbour Road II diharapkan dapat mengurai pergerakan arus lalu lintas dari timur ke utara hingga ke barat Jakarta yang selama ini kerap padat dan macet. Setelah jalan tol itu beroperasi, kata dia, daya saing kawasan industri di Jakarta Utara juga diharapkan meningkat, baik pada level regional maupun internasional.

Pengamat tata kota, Nirwono Joga, menilai proyek pembangunan jalan tol Harbour Road II perlu dikaji ulang. Apalagi kalau pembangunannya dapat membahayakan konstruksi bangunan bersejarah dan cagar budaya di kawasan Kota Tua. "Perlu dikaji ulang kemendesakannya dan keefektifannya," kata Nirwono.

Menurut dia, jika tujuan pembangunan adalah mengurai kemacetan di jalur pelabuhan, seharusnya pembangunan jalur kereta api khusus angkutan barang dan logistik lebih diprioritaskan. "Kereta lebih efisien. Selain memiliki daya angkut besar, tidak memicu kemacetan," kata dia. "Di Jepang dan Jerman, misalnya, lebih memilih jalur rel dibanding tol." **IMAM HAMDI | INGE KLARA SAFITRI**

---

# Plus-Minus Jalan Tol Susun

**R**ENCANA pembangunan jalan tol Harbour Road II menuai kritik. Salah satu yang mengkritik adalah peneliti sekaligus Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja.

Menurut Elisa, sebelum jalan tol susun pelabuhan dengan rute Tanjung Priok–Pluit itu dibangun, diperlukan kajian ulang tentang kepadatan lalu lintas di jalur tol Harbour I (Wiyoto Wiyono). “Asal-muasal (kepadatan) dari jalan-jalan non-tol yang tidak memiliki aturan pembatasan dan tak memiliki banyak opsi transportasi publik,” kata dia, kemarin. “Artinya, bila suatu jalur padat, (solusinya) tidak harus dilebarkan atau ditambah ruas jalannya.”

## Keuntungan:



- » Kemacetan di Jalan Wiyoto Wiyono terurai.
- » Kendaraan berat tak lagi melewati jalur non-tol Kali Besar (getaran mobil dikhawatirkan merusak kekokohan bangunan lama di Kawasan Kota Tua).

## Kerugian:



- » Memberi kesempatan bertambahnya kendaraan pribadi.
- » Berpotensi merusak sebagian kawasan Kota Tua jika pembangunannya melewati Gudang Timur dan Museum Bahari.

Judul	<b>Bendungan Rp2,72 Triliun Dilelang</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Berdasarkan Informasi Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikutip bisnis, Selasa (15/10) pelelangan bendungan Jragung Dibagi menjadi tiga paket.		



Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) membuka pelelangan proyek Bendungan Jragung (Jawa Tengah) dengan nilai kontrak diperkirakan mencapai Rp2,72 triliun.

Rivki Maulana  
rivki.maulana@bisnis.com

Berdasarkan informasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang dikutip *Bisnis*, Selasa (15/10), pelelangan Bendungan Jragung diba-

gi menjadi tiga paket. Paket pertama dibuka dengan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp995,06 miliar. Adapun HPS paket kedua dan ketiga masing-masing sebesar Rp946,68 miliar dan Rp785,73 miliar. Pembiayaan pembangunan Ben-

► Bendungan Jragung merupakan salah satu bendungan dalam proyek pembangunan 65 bendungan yang dicanangkan pada 2015.

ndungan Jragung berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2019. Bendungan tersebut menjadi bendungan baru kedua yang dilelang pada tahun ini menyusul Bendungan Tiu Suntuk (Nusa Tenggara Barat).

Pengumuman prakualifikasi Bendungan Jragung sudah dilansir pada 11 Oktober 2019 lalu. Penetapan pe-

menang dijadwalkan pada 11 Desember 2019 dan berlanjut ke tahap penandatanganan kontrak lima hari berikutnya.

Berdasarkan data Pusat Bendungan Kementerian PUPR, Bendungan Jragung dirancang dengan kapasitas tampung sebanyak 103 juta meter kubik pada saat normal dan 135,43 juta meter kubik saat kondisi banjir. Bendungan ini akan menjadi sumber irigasi bagi 6.435 hektare lahan pertanian di Demak dan sekitarnya.

Dalam catatan *Bisnis*, Bendungan Jragung merupakan salah satu bendungan dalam proyek pembangunan 65 bendungan yang dicanangkan pada 2015. Hingga 2018, sebanyak 56 bendungan sudah masuk tahap konstruksi yang mana 15 bendungan sudah rampung.

#### KAPASITAS TAMPUNG

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, sebelumnya mengatakan pembangunan bendungan baru dan lanjutan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tampung air yang baru mencapai 14 miliar meter kubik per tahun. Kapasitas sebesar itu hanya mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11% dari total 7 juta hektare lahan irigasi.

Adapun pembangunan Bendungan Tiu Suntuk (Nusa Tenggara Barat) senilai Rp1,35 triliun menjadi proyek bendungan baru pertama yang dibuka lelangnya pada 2019. Berdasarkan informasi dari LPSE, pelelangan Bendungan Tiu Suntuk dibagi ke dalam dua paket, yaitu paket I dan paket II dengan harga perkiraan sendiri (HPS) masing-masing Rp704,17 miliar dan Rp646,9 miliar.

Tahap prakualifikasi pelelangan Bendungan Tiu Suntuk sudah diumumkan pada 23 September 2019. Saat ini tahapan berlanjut ke tahap memasukan dokumen kualifikasi. Berdasarkan jadwal, pengumuman pemenang dijadwalkan pada 6

Desember 2019, berlanjut ke penandatanganan kontrak pada 19 Desember 2019.

Bendungan ini dirancang dengan kapasitas tampung sebanyak 25 juta meter kubik. Proyek ini bakal menjadi proyek bendungan keenam, menyusul Bendungan Bintang Bano, Bendungan Tanju, Bendungan Mila, Bendungan Meninting, dan Bendungan Beringin Sila.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membuka lelang pembangunan Bendungan Ladongi Sulawesi Tenggara Paket II dengan perkiraan kontrak Rp283 miliar.

Berdasarkan informasi LPSE, pengumuman prakualifikasi sudah dibuka pada 25 September 2019. Saat ini pelelangan memasuki tahap evaluasi dokumen kualifikasi.

Pemenang dijadwalkan pada 28 November 2019. Selanjutnya penandatanganan kontrak direncanakan pada 10 Desember 2019.

Adapun pembangunan Bendungan Ladongi Paket I sudah telah mencapai 76% per September 2019. Konstruksi paket I dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) yang memenangkan lelang dengan penawaran Rp844,17 miliar. Pembiayaan bendungan ini berasal dari anggaran negara tahun 2016.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Hari Suprayogi, mengatakan Bendungan Ladongi bisa menampung air hingga 45 juta meter kubik. Bendungan bakal menjadi sumber air bagi daerah irigasi eksis seluas 2.212 hektare dan 1.392 hektare daerah irigasi pengembangan.

Program pembangunan 65 bendungan yang seluruhnya akan rampung pada 2023 diharapkan bisa menambah pasokan irigasi lahan pertanian menjadi 19%-20%. Bendungan baru juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal. ■

Judul	<b>BUMN Perlu jadi Pionir Di KEK</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Pembangunan Infrastruktur dasar menjadi modal penting untuk menarik minat investor menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penempatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pioneer pelaku ekonomi dapat menjadi langkah selanjutnya bila para infestor tetap enggan melabuhkan dananya di KEK		

► KAWASAN EKONOMI KHUSUS

# BUMN Perlu jadi Pionir di KEK

Bisnis, JAKARTA — Pembangunan infrastruktur dasar menjadi modal penting untuk menarik minat investor menanamkan modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penempatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pionir pelaku ekonomi dapat menjadi langkah selanjutnya bila para investor tetap enggan melabuhkan dananya di KEK.

Pengamat Ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus, mengatakan bahwa skema KEK pada prinsipnya adalah usaha pemerintah dalam mengembangkan perekonomian suatu wilayah yang disesuaikan dengan kompetensinya.

Skema atau program ini sudah selayaknya diarahkan di kawasan-kawasan bukan perkotaan yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dasar konektivitas menjadi tugas pertama yang harus diselesaikan pemerintah.

"Kenapa KEK kurang diminati investor, yang pertama harus diperiksa kembali adalah apakah infrastruktur yang dibangun sudah mencukupi? Infrastruktur yang dimaksud adalah terkait jalan atau konektivitas, energi, dan air," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (14/10).

Apabila infrastruktur dasar tersebut sudah memenuhi semua kebutuhan mobilitas dan operasional produksi, katanya, maka investasi seharusnya akan mengalir ke kawasan tersebut dengan sendirinya. Namun, dia juga

tidak memungkiri ada kemungkinan investasi tetap seret kendati infrastruktur dasar telah terbangun.

"Kalau infrastruktur dasar sudah terbangun baik tetapi investor tetap enggan berinvestasi maka yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengugaskan BUMN untuk terjun sebagai pionir di KEK. Harapannya, ada investor dari swasta yang tertarik mengikuti jejak BUMN tersebut untuk berinvestasi."

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya juga mengakui kehadiran KEK belum memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah di kawasan tersebut.

Pemerintah memang berhasil memenuhi target yang dicanangkan yakni pembentukan 17 KEK di seluruh Indonesia pada tahun ini, yaitu 13 KEK sudah berjalan dan empat KEK yang masih menunggu Peraturan Presiden.

Namun, berdasarkan data Sekretariat Dewan KEK hingga Oktober 2019 total komitmen investasi pada KEK yang telah beroperasi senilai Rp85,3 triliun. Adapun realisasi investasi baru di kisaran Rp21 triliun.

## INSENTIF FISKAL

Pemberian insentif fiskal untuk menarik minat para investor dinilai Heri sebagai langkah tepat yang diambil pemerintah. Kendati masih diperlukan beberapa revisi, insentif itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor.

"Insentif fiskal terkait pelaku ekonomi dan industri di KEK juga sudah sangat banyak. Ini kebijakan yang tepat untuk juga menarik minat investor."

Dalam draf revisi PP No.96/2015 beserta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunannya terkait insentif fiskal disebutkan besaran dan jangka waktu pemberian insentif bakal menggunakan angka tetap sehingga tidak timbul ketidakpastian dan multitafsir.

Semua kegiatan usaha utama yang menyelenggarakan kegiatannya di KEK bakal menikmati *tax holiday* sebesar 100%, tetapi jangka waktunya tergantung pada nilai investasi yang digelontorkan.

Salah satu contohnya, kegiatan usaha dengan nilai investasi Rp100 miliar hingga Rp500 miliar bakal menerima *tax holiday* selama 5 tahun. Selanjutnya, kegiatan usaha dengan nilai investasi Rp500 miliar hingga Rp2,5 triliun dapat menerima *tax holiday* selama 7 tahun. Dengan revisi tersebut, diharapkan investor dapat tertarik untuk berinvestasi karena regulasi sudah tidak lagi multitafsir.

Salah satu perusahaan swasta yang baru-baru ini telah berkomitmen untuk mengembangkan KEK adalah PT Intelegensia Graha Tama. Diketahui, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Singosari, menginvestasikan Rp300 miliar untuk membangun infrastruktur dan utilitas dasar di kompleks kawasan tersebut. (Aprianus Dani T)

Judul	Danau Toba Kantongi Tujuh Investor	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 8		
Resume	Adapun Nilai total investasi untuk proyek itu sebesar Rp6,1 triliun. "Untuk tahap pertama, nilai investasi yang sudah terealisasi sekitar Rp2 triliun dari total investasi sebesar Rp6,1 triliun." Kata arie pasetyo, direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Selasa (15/10).		

► PENGEMBANGAN KAWASAN

# Danau Toba Kantongi Tujuh Investor

Bisnis, MEDAN — Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau BPODT telah mengantongi tujuh investor untuk pembangunan infrastruktur kawasan wisata Danau Toba.

Asteria Desi Kartika Sari  
asteria.desi@bisnis.com

Adapun nilai total investasi untuk proyek itu sebesar Rp6,1 triliun.

"Untuk tahap pertama, nilai investasi yang sudah terealisasi sekitar Rp2 triliun dari total investasi sebesar Rp6,1 triliun," kata Arie Prasetyo, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Selasa (15/10).

Arie menjelaskan bahwa BPODT telah mendatangkan tujuh investor pada IMF Word Bank Meeting di Bali yang digelar belum lama ini.

Dia berharap agar pada akhir tahun depan infrastruktur utilitas dasar telah terbangun seluruhnya. Guna mewujudkan hal itu, dia mengungkapkan bahwa para investor lebih konfidennya merealisasikan investasinya paling lama 1 tahun hingga 2 tahun. "Ke depan hotel-hotel sudah beroperasi dan tidak ada lagi masalah," lanjutnya.

Perihal lahan, kata Arie, seluas 386,72 hektare telah diperoleh untuk pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar Danau Toba. Adapun pembebasan lahan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjadikan Toba Kaldera Resort atau lahan otorita.

Selain itu, lanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan, Balai Besar Jalan Nasional juga telah mere-

## Pembagian Anggaran Rp4,04 Triliun dari Pemerintah



Sumber: Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.

©BISNIS/THI UTOMO

alisasikan pembangunan jalan sepanjang 1,9 kilometer, dengan lebar 18 meter di area Selatan Zona Otorita. Untuk total jalan yang akan dibangun kurang lebih 8,8 kilometer. Adapun pada tahun ini akan diselesaikan 1,9 kilometer, sisanya akan dianggarkan pada 2020.

"Infrastruktur lain yang akan dibangun penyediaan air baku dan pengelolaan air limbah. Kami juga mengundang PLN untuk berkoordinasi pembangunan jaringan listrik di kawasan otorita," lanjutnya.

Selain investasi dari pihak swasta, pemerintah pusat juga menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,04 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan utilitas dasar kawasan Danau Toba pada 2020.

Anggaran ini antara lain terbagi dari Kementerian Perhubungan (Kemenuh) Rp1,06 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUUR) Rp2,5 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rp23 miliar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Rp17 miliar, Badan Ekonomi Kreatif

(Bekraf) Rp4,8 miliar, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rp400 miliar dan lainnya.

"Instruksi bukan hanya instruksi saja, tapi ada anggarannya. Bupati kalau bapak minta, ya sekarang. Saya ingat teman-teman di Danau Toba, momentum seperti ini belum tentu terulang 10 atau 20 tahun lagi, jangan disia-siakan"katanya.

Arief menjelaskan bahwa pemerintah akan menjadikan Danau Toba wisata destinasi dunia yang akan disebut Bali baru di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan sudah mendapatkan sertifikasi dari Unesco Global Geopark.

"Kalau mau kelas dunia, maka atraksinya harus kelas dunia. Danau Toba ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Unesco Global Geopark. Ini perjuangan yang dilakukan pemerintah akhirnya sudah membuahkan hasil," ungkapnya.

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan Danau Toba. Dia berharap agar 'surga kecil' yang ada di Danau Toba akan tambah indah yang dikembangkan oleh anak bangsa. □

► BPODT telah mendatangkan tujuh investor pada IMF Word Bank Meeting di Bali yang digelar belum lama ini.

Judul	<b>JSMR Akan Ikuti Proses PKPU</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 11		
Resume	Jasamarga (Persero) Tbk. menyatakan akan menghadapi proses gugatan perkara penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) di pengadilan niaga Jakarta Pusat, yang diajukan oleh Muisah dan Musthafa Rachman.		

► PROYEK TOL ULUJAMI-SERPONG

## JSMR Akan Ikuti Proses PKPU

Bisnis, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. menyatakan akan menghadapi proses gugatan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang diajukan oleh Muisah dan Musthafa Rachman.

Corporate Secretary Jasa Marga M. Agus Setiawan mengatakan bahwa Jasa Marga dalam melakukan aktivitas korporasi selalu mengedepankan azas *Good Corporate Governance* (GCG).

“Sebagai perusahaan yang mengedepankan GCG, Jasa Marga akan menghadapi proses gugatan ini dan akan mengikuti proses hukum hingga dikeluarkannya putusan oleh Hakim Pengadilan Niaga,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (15/10).

Namun demikian, dia menegaskan Jasa Marga tidak dalam posisi untuk melaksanakan keputusan Pengadilan tersebut karena Jasa Marga bukanlah pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembebasan tanah untuk jalan tol berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Agus menambahkan yang lebih mendasar terhadap kedua bidang tanah di ruas Pondok Aren—Ulujami

(yang digugat oleh Muisah) dan di wilayah Ceger (yang digugat oleh Mustafa Rahman) telah dilakukan pembayaran ganti rugi.

Dia menjelaskan dalam kasus Muisah telah dibayarkan oleh Jasa Marga selaku penerima kuasa dari Kementerian PUPR pada 2001. Sementara itu, dalam kasus Mustafa telah dibayarkan langsung oleh Kementerian PUPR berdasarkan rekomendasi dan penetapan dari Panitia Pengadaan Tanah (Walikota) pada 2003.

BUMN penyelenggara jasa jalan tol itu dimohonkan PKPU oleh Muisah dan Musthafa Rachman, karena ganti rugi pembebasan lahan proyek tol Jakarta-Serpong tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan itu.

Para pemohon diwakili oleh Muisah yang melayangkan permohonan PKPU dengan perkara No. 208/Pdt. Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt. Pst pada 26 September 2019.

Jeffrey, kuasa hukum pemohon dari kantor hukum Johny Sibarani dan Rekan, mengatakan para pemohon menagih piutang ganti rugi pembebasan lahan dengan total senilai Rp15,35 miliar, yang terdiri dari Muisah Rp2,35 miliar dan Musthafa Rachman Rp13 miliar.

“Kenapa PKPU? Karena sebelumnya kami sudah menang gugatan di PN Jakarta Selatan. Menang dan inkrah. Jasa Marga sudah ditegur atau *aanmaning* tetapi tetap tidak mau membayar,” kata Jeffrey kepada *Bisnis*, Rabu (9/10).

Dari penelusuran *Bisnis*, Jasa Marga tidak puas atas gugatan dari Muisah yang telah ditetapkan inkrah oleh Pengadilan Tinggi dengan menggugat balik Muisah pada 17 Januari 2013 atas perkara No. 31/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.

Dalam tuntutananya Jasa Marga meminta pengadilan agar menyatakan putusan No. 1081/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel dan putusan PT DKI Jakarta No. 201/Pdt/2008/PT.DKI yang menghukumnya untuk membayar ganti rugi telah melanggar peraturan pemerintah.

Selain itu, meminta supaya putusan PN Jakarta Selatan dengan perkara No. 951 K/Pdt/2009 tidak dapat dilaksanakan. Perkara tersebut sampai ke tingkat Peninjauan Kembali dengan pemohon Jasa Marga atas perkara No. 766 PK/Pdt/2018 pada 8 Januari 2018.

Namun, majelis hakim yang diketuai Soltoni Mohdallu menolak permohonan PK tersebut. (Krizia P. Kinanti)

Judul	<b>Jaga Masa Depan teluk</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Kompas Halaman 15		
Resume	Teluk balikpapan masuk dalam rancangan pengembangan jika ibu kota benar-benar pindah ke panajam paser utara. Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang.		

# Jaga Masa Depan Teluk

Teluk Balikpapan masuk dalam rencana pengembangan jika ibu kota negara benar-benar pindah ke Penajam Paser Utara. Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan matang.

**BALIKPAPAN, KOMPAS** — Kondisi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, akan berubah jika konsep pembangunan penopang ibu kota negara baru disetujui. Pemerintah diminta mempertimbangkan bagian utara teluk tetap sebagai kawasan konservasi yang mempertahankan daya dukung lingkungan dan sumber tangkapan nelayan tradisional.

Dari sisi transportasi, jika titik nol ibu kota baru ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Pelabuhan Mentawir di hulu Teluk Balikpapan akan dikembangkan. Selain itu, ada usulan pembangunan landasan pesawat terbang air di teluk itu.

Akses dari Balikpapan menuju Sepaku akan lebih pendek, sekitar 40 kilometer, jika melalui Jembatan Pulau Balang

yang sedang dibangun. Menggunakan jalan darat provinsi, jaraknya sekitar 80 km.

Ketua Forum Peduli Teluk Balikpapan Husen mengatakan, pembangunan Teluk Balikpapan sebaiknya cukup pada Jembatan Pulau Balang. Seluruh kawasan teluk ke arah utara dari Pulau Balang diharapkan dijadikan kawasan konservasi, sebagai kawasan ekosistem esensial. "Termasuk di dalamnya wilayah perairan, hutan mangrove, dan hutan daerah penyangga," katanya di Balikpapan, Selasa (15/10/2019).

Total luas kawasan Teluk Balikpapan lebih dari 180.000 hektar dengan kawasan hutan mangrove 19.400 ha. Kawasan mangrove yang masih bagus tersisa 17.000 ha. Lebih dari 2.000 ha menurun kualitasnya.

Pembangunan dan aktivitas

industri di kawasan Teluk Balikpapan relatif ramai. Kawasan itu juga tempat hidup satwa dilindungi, seperti pesut mahakam yang terancam punah dan bekantan yang tersisa sekitar 1.000 ekor.

Sisi selatan Teluk Balikpapan juga padat lalu lalang kapal ponton pengangkut batubara, lalu lintas kapal penumpang, dan kapal barang. Data Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) tahun 2019, lebih dari 10.000 nelayan mengakses dan menangkap ikan di Teluk Balikpapan. Mereka datang dari Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan.

Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Koordinasi Jaringan LSM dan Analisis Dampak Lingkungan Hanni Adiaty

mengatakan, pemetaan masalah makro di sekitar Kecamatan Sepaku sudah dilakukan awal Oktober bersama tokoh masyarakat dan LSM. Hal itu akan dijadikan rujukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait masalah makro.

"Kami menampung masalah-masalah makro lebih dulu terkait kesiapan masyarakat dengan asumsi ibu kota di Kecamatan Sepaku," katanya. Saat ini, titik nol ibu kota baru belum ditentukan, apakah di Sepaku atau di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara.

## Tunggu kepastian

Penyusunan lengkap dan detail KLHS menunggu lokasi pasti ibu kota baru, termasuk kajian lengkap Teluk Balikpapan. Pemerintah juga masih mempertimbangkan keterse-

dian sumber daya air.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Anang Muchlis mengatakan, ada beberapa potensi sumber daya air yang bisa menyokong kebutuhan air bersih di sekitar Sepaku dan Samboja. BWS Kalimantan III masih menyiapkan lelang pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Sepaku dengan kapasitas 1.500 liter per detik.

"Mulanya, bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan air di Balikpapan. Namun, bisa juga digunakan penduduk ibu kota baru," ujarnya.

Sebelum terlambat, kata Husen, aktivitas ekonomi di sisi utara Teluk Balikpapan sebaiknya hanya untuk ekowisata, perikanan tradisional, dan bisnis perdagangan karbon. Hal itu demi keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. (CIP)



**Suasana** Pelabuhan Feri Karianga di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (15/10/2019). Pelabuhan ini terletak di Teluk Balikpapan yang menjadi akses paling cepat menuju Kabupaten Penajam Paser Utara, calon lokasi ibu kota negara yang baru.

Judul	<b>Tanggul Laut</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Republika Halaman 22		
Resume	Warga beraktivitas di Kawasan tanggul laut muara baru, Jakarta utara, Selasa (15/10). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut nasional.		



**TANGGUL LAUT** Warga beraktivitas di kawasan tanggul laut Muara Baru, Jakarta Utara, Selasa (15/10). Pemerintah Provinsi [Pemprov] DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] mengambil alih pembangunan segmen tanggul laut Nasional Capital Integrated Coastal Development [NCICD] dari pengembang reklamasi di Teluk Jakarta sepanjang 13,4 kilometer di kawasan Jakarta Utara.

Judul	<b>Kulon Progo bisa jadi pusat logistik</b>	Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
Media	Bisni Indonesia Halaman 26		
Resume	Keberadaan bandara kulon Progo (YIA) tidak hanya mendorong jumlah wisatawan ke daerah istimewa Yogyakarta (DIV) dan Jawa Tengah, tetapi juga menumbuhkan pusat logistik baru.		

► DAMPAK BANDARA BARU

## Kulon Progo Bisa Jadi Pusat Logistik

Bisnis, YOGYAKARTA — Keberadaan Bandara Kulon Progo (YIA) tidak hanya mendorong jumlah wisatawan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, tetapi juga menumbuhkan pusat logistik baru.

Hilman Tisnawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, menuturkan bandara YIA seluas 600 hektare (ha) bakal mendatangkan lebih banyak wisatawan ke area Jogja, Solo, Semarang (Joglosemar). Adapun, sektor pariwisata sendiri menjadi tulang punggung perekonomian Yogyakarta.

“Ketika pemerintah pusat menetapkan 10 Bali Baru, dengan Candi Borobudur di dalamnya, potensi ini harus ditangkap dengan baik. Selain untuk mendorong pariwisata, kawasan sekitar Bandara Kulon Progo juga dimanfaatkan untuk pusat logistik baru,” ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (15/10).

Dengan area seluas itu,

PT Angkasa Pura I (Perseero) selaku pengelola bakal mengembangkan kawasan kota bandara (*airport city*), yang mencakup sejumlah pengembangan properti seperti pergudangan, logistik, kargo, perhotelan, dan perkantoran.

Selain itu, dalam radius 8 km dari Bandara Kulon Progo dapat menjadi zona aetropolis. Aerotropolis adalah sebuah kawasan atau kota baru yang tata letak, infrastruktur, dan ekonomi berpusat pada bandara.

Menurut Hilman, aetropolis bisa menumbuhkan berbagai sektor industri baru, bahkan hingga wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oleh karena itu, keberadaan Bandara Kulon Progo juga dapat menjadi pusat logistik Jawa.

“Jadi efek ekonomi dari Bandara Kulon Progo bukan hanya dari arus penumpang, melainkan juga barang, sehingga dapat menjadi pusat logistik. Hal ini didukung kapasitas *runway* yang da-

pat menampung pesawat berbadan lebar,” imbuhnya.

Untuk mendukung potensi YIA sebagai pusat arus penumpang dan logistik, pemerintah akan mengembangkan moda transportasi terintegrasi, seperti kereta api dan jalan tol, di antaranya jalur Candi Borobudur—Yogyakarta, Bawen—Yogyakarta, dan Solo—Yogyakarta.

Hilman menyebutkan pengembangan Bandara Kulon Progo yang menelan investasi Rp11 triliun berhasil mendorong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY hingga 7,5% pada kuartal I/2019, dan 6,8% pada kuartal II/2019.

Dalam jangka panjang, diharapkan efek ekonomi dari bandara dan kawasan sekitarnya semakin terasa, sehingga dapat memacu PDRB Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Sektor andalan yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Yogyakarta adalah sisi konsumsi

yang sifatnya mendorong pariwisata, seperti makanan dan minuman, jasa penginapan, transportasi, perhotelan, dan sebagainya.

Agar pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak luas bagi masyarakat, konsep pengembangan yang efektif ialah wisata berbasis komunitas (*community base tourism/ CBT*). Menurut Hilman, hal itu berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan daerah.

Sebagai contoh, Tebing Breksi di Kabupaten Sleman dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat bersama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Setiap bulan, penghasilan tukang parkir bisa mencapai Rp2 juta.

“Tidak semua daerah punya keistimewaan ini [wisata berbasis komunitas]. Ini membuat pendapatan masyarakat naik, penggguran turun.” (*Hafiyyan*)